

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penilaian kinerja sebuah perusahaan secara sederhana dapat tercermin dari pencapaian laba dari perusahaan tersebut. Pihak – pihak yang berkepentingan pada suatu perusahaan menggunakan informasi laba tersebut dalam penentuan keputusan yang akan diambil guna kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Informasi laba suatu perusahaan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait bonus, kompensasi, tolak ukur prestasi maupun kinerja pihak manajemen serta sebagai dasar penentuan besaran pajak. Oleh sebab itu kualitas dari informasi laba yang disajikan perusahaan tentunya menarik perhatian dari berbagai kalangan baik investor, kreditor, para pembuat kebijakan akuntansi, maupun pemerintah yang dalam hal ini merupakan Direktorat Jendral Pajak.

Persaingan yang sangat ketat yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat bertahan dalam pasar global, terutama pada industri manufaktur di Inonesia. Tuntutan yang harus dimiliki perusahaan saat ini ialah keunggulan yang kompetitif, bukan hanya kuantitas dan kualitas produk saja yang ditawarkan namun juga mencakup pengelolaan keuangan dengan baik agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Dengan begitu dalam pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan.

Laporan keuangan adalah merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Pada umumnya manajemen, akan memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan.

Menurut (Fahmi, 2014) manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan manajemen laba dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen, memang sesuatu yang lazim besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajemen tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Selain motivasi bonus motivasi penghematan pajak menjadi motivasi yang paling nyata.

Disisi lainnya pengestimasi kekuatan laba (*earning power*) dalam memperkirakan risiko investasi maupun kredit dari informasi laba tersebut akan dapat membantu para pemilik (*stakeholder*) sehingga pihak manajemen bertanggung jawab akan informasi laba tersebut yang mana kinerja diukur melalui pencapaian laba yang diperoleh.

Terdapat beberapa fenomena praktik manajemen laba yang pernah terjadi. Salah satu fenomena manajemen laba yang pernah terjadi di luar negeri adalah yang dilakukan oleh PT Toshiba Corporation. Pimpinan puncak PT Toshiba Corporation terlibat secara sistematis dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dollar AS selama beberapa tahun (kompas.com). Berdasarkan hasil investigasi, diketahui tindakan pengelembungan laba tersebut dilakukan karena PT Toshiba telah gagal mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 ditambah lagi krisis global yang melanda pada waktu itu. Tindakan pengelembungan laba tersebut membuat CEO Hisao Tanaka memutuskan untuk mengundurkan diri, selain itu nama Toshiba juga dihapus dari indeks saham dan penurunan penjualan yang signifikan (integrity-Indonesia.com). Kasus serupa juga terjadi di negara Amerika Serikat yaitu kasus pada Enron Corporation dan Xerox Corporation Tidak hanya kasus di luar negeri. Terdapat pula kasus praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia.. Tidak hanya kasus di luar negeri. Terdapat pula kasus praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia. Kasus manajemen laba yang baru-baru ini dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perbedaan informasi antara data internal

dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit memiliki beberapa poin penting. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan (kontan.co.id, 03;10;2018).

Kesalahan yang terjadi di PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) terletak pada laporan kuangannya yang tidak sinkron dan banyak salah. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan PT Inovisi Infracom Tbk: Bagian utang lain-lain kepada pihak terelasi dan pihak ketiga. BEI menilai bagian ini tidak *tie up* dengan informasi yang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Bagian aset tetap, BEI menilai saldo awal aset tetap pada LK Tahunan 2013 hasil auditan. Bagian laba bersih per saham, BEI menemukan perusahaan menggunakan “laba periode berjalan”, seharusnya menggunakan “laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk” saja sehingga *overstated*. Bagian pembayaran kas kepada karyawan, BEI menemukan adanya salah kaji, karena berdasarkan LK Tengah Tahunan pembayaran kas kepada karyawan mencapai Rp 1,91 triliun, tapi pada periode kuartal III-2014 turun menjadi hanya Rp 59 miliar. Perusahaan menyatakan seharusnya tertulis Rp1,9 miliar bukan triliun. Bagian penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi (laporan arus kas), BEI menemukan adanya indikasi salah kaji. Berdasarkan laporan posisi keuangan, pelunasan utang berelasi Rp 124 miliar, tapi di laporan arus kas hanya diakui pembayaran Rp 108 miliar. Bagian laporan segmen usaha, BEI menyatakan perusahaan tidak dapat mengalokasikan 45,5% asetnya kepada masing-masing segmen usaha. Bagian jumlah kewajiban, BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan posisi keuangan. Bagian kategori instrumen keuangan, BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan keuangan tahunan hasil auditan (detik.com).

Permasalahan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk terletak pada pelaporan laba bersih perusahaan. Manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar Rp 132 miliar dan sudah diaudit. Namun, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, keuntungan yang sebenarnya hanya sebesar Rp 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan lainnya terletak pada persediaan. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu KAP tersebut juga membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut (davidparsaoran.wordpress.com,04;11;2009)

Lain halnya dengan kasus di PT Indofarma Tbk. Bapepam menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma sendiri. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti diantaranya, nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (*overstated*). Akibatnya harga pokok penjualan mengalami *understated* dan laba bersih mengalami *overstated*. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal (detik.com).

Pada kasus PT Agis Tbk, BEI hanya meminta perusahaan itu menyampaikan informasi kepada publik. Namun, Direktur Utama PT Agis Tbk saat itu didenda sebesar Rp 5 miliar karena pemberian informasi yang secara material tidak benar. Pada tahun 2007, PT Agis Tbk pernah tersandung kasus saham. Saham PT Agis Tbk tiba-tiba anjlok. Setelah ditelusuri, ternyata hal ini terjadi karena adanya manipulasi saham yang dilakukan oleh broker. Caranya

adalah dengan titip jual saham. Sebenarnya titip jual beli saham ini dilarang oleh BEI, tapi dilanggarnya (greatariana.blogspot.com,18;07,2013).

Beberapa kasus mengenai manajemen laba diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan (Sulistyanto, 2008). Pengertian lain dari manajemen laba adalah suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan (Dananjaya dan Ardiana, 2016). Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Aditama dan Anna, 2014 dalam Putra et al, 2019).

Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam penggunaan dasar akrual oleh pihak manajemen disaat penyusunan laporan keuangan sehingga manajemen dapat mengatur laba dengan cara menaikkan, menurunkan atau meratakan laba (Dananjaya dan Ardiana, 2016). Pihak manajemen seringkali memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik oleh pihak eksternal dimana perusahaan yang mempunyai laba yang kecil direkayasa menjadi lebih besar agar terlihat baik oleh pihak eksternal dan perusahaan yang mempunyai laba yang besar direkayasa menjadi lebih kecil agar pajak tangguhan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibayar seminimal mungkin.

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (Suandy, 2011:99). Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya (Waluyo, 2012:269).

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak dari PPh dimasa

yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Hal ini dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besarnya beban pajak tangguhan (Lubis dan Suryani, 2018).

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan (Waluyo, 2012:272). Sedangkan pengertian lain dari beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Sumomba, 2010 dalam Putra et al, 2019).

Pada tahun 2018, pendapatan negara dari penerimaan pajak yaitu sebesar 94,00% dari total pendapatan negara (kontan.co.id). Sehingga, penerimaan pajak negara merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara. Pengungkapan pajak penghasilan pada laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk berbagai alasan diantaranya adalah untuk penaksiran manajemen laba (Philips et al, 2003 dalam Putra et al, 2019).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan pajak secara eufimisme ini sering disebut dengan perencanaan pajak (Suandy, 2011:1). Perencanaan pajak adalah suatu upaya agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2015 dalam Yunila dan Aryati, 2018). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan berharap untuk dapat meminimalisir atau meminimumkan pembayaran pajak bagi perusahaan dengan cara yang tepat dan legal.

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba sudah pernah dilakukan oleh Putra *et al* (2019) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka

semakin besar pula peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba (Putra *et al* 2019). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al* (2019) yang menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunila dan Aryati (2018) perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al* (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sari *et al* (2019) yang menyimpulkan bahwa Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pentingnya laporan laba yang berkualitas dalam perusahaan memicu banyaknya penelitian yang muncul dengan dengan tema tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rona Naula Oktaviani, Emrinaldi Nur, dan Vince Ratnawati (2015) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laba dengan manajemen laba sebagai variabel intervening studi kasus pada 64 sampel di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014. Ani Kurnia Ningsih Lestari dan Ari Dewi Cahyati (2017) meneliti pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laba akuntansi studi kasus pada 144 sampel perusahaan manufaktur tahun 2012-2015.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kualitas laba perusahaan seperti *good corporate governance*, *leverage* dan ukuran perusahaan. Menurut Gahani Purnama Wati dan I Wayan Putra (2017) *good corporate governance* lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan sebagai suatu praktik dalam pengelolaan perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan *stakeholder*. Dengan penerapan *good corporate governance*, maka diharapkan

pengelolaan sumber daya diperusahaan menjadi efektif, efisien, ekonomis dan produktif dengan diterapkannya lima prinsip *good corporate governance* yang baik, yaitu : *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan integrity*.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi, karena perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik akan meminimalisir manipulasi laporan keuangan. Ani Kurnai Ningsi Lestari dan Ari Dewi Cahyati (2017) dalam penelitiannya menyatakan *good corporate governance* yang meliputi ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kualitas laba, sedangkan jumlah pertemuan, kompetensi komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh pada kualitas laba, penelitian ini berbanding kebalik dengan penelitian Vika Fitranita dan Isma Coryanata (2018) yang menyatakan *good corporate governance* tidak berpengaruh pada kualitas laba.

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok yaitu perusahaan besar, kecil dan sedang (Gahani Purnama Wati dan I Wayan Putra, 2017). Perusahaan yang berukuran besar mempunyai beberapa kelebihan dari pada perusahaan kecil. Kelebihan perusahaan besar yaitu mudah untuk mencari sumber dana untuk perusahaan, karena perusahaan yang berukuran besar akan lebih menyakinkan investor untuk melakukan investasi kedalam perusahaan tersebut, perusahaan yang berukuran besar menentukan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam berbagai kontrak terkait operasional perusahaan, dan perusahaan yang berukuran besar biasanya mempunyai laporan keuangan yang berkualitas jadi akan menghasilkan laba yang berkualitas juga.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena adanya hasil penelitian yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana jika beberapa variable tersebut diteliti kembali untuk melihat hasil yang terbaru. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Riyani Setiawan (2019), perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu hanya

pada tahun nya saja. Jika penelitian sebelumnya meneliti selama empat tahun dari tahun 2015-2018, penelitian yang dilakukan sekarang pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan paparan fenomena di atas, melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Variable Moderating *Good Coporate Governance*”** .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan secara bersama-sama terhadap Manajemen Laba?
4. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dalam program GCPI Index periode 2016-2019?
5. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi antara Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dam Terdaftar dalam program GCPI Index periode 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mengungkapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Perencanaan Pajak secara parsial terhadap Manajemen Laba.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan secara bersama-sama terhadap Manajemen Laba.
4. Untuk mengestimasi dan menguji *Good Corporate Governance* dapat memoderasi antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dalam program CGPI Index periode 2016-2019
5. Untuk mengestimasi dan menguji Good corporate governance dapat memoderasi antara Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dalam program CGPI Index periode 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara akademis maupun manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Akademi

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait **Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019**. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa **teori pensinyalan dan teori agensi**. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel Perencanaan Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (teori pensinyalan).
2. Penggunaan variabel Beban Pajak Tangguhan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (teori agensi).
3. Penggunaan variabel Manajemen Laba dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (teori agensi).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna dapat menentukan laporan keuangan mana yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat tidak tidak menyesatkan dan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan tersebut.

2. Bagi Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

4. Bagi Perusaahaam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menilai kinerja manajemen dan sebagai pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat atas laporan keuangan perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka perlu adanya batasan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus, mendalam dan tidak meluas kearah masalah lain yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan, namun dalam penelitian ini variabel yang digunakan hanya perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan *good corporate governance*.

2. Objek yang diteliti di batasi hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan memiliki *corporate govenance perception index* yang tercatat di IICG.
3. Tahun pengamatan untuk penelitian ini hanya lima tahun yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan Pemahaman yang lebih jelas tetantang pedoman dalam penulisan proposal skripsi, maka penulis mengelompokan materi menjadi bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah perumusan permasalahan,tujuan penelitian,kegunaan penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sumber (acuan) topik penelitian pada umumnya, dan model konsep penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, saran dan implikasi manajerial.